

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pengembangan Pariwisata Berbasis Pengarusutamaan Gender di Desa

Wisata Nongkosawit Kota Semarang

Dari hasil penelitian tentang pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit dilihat dari lima dimensi belum optimal. Hal ini terlihat dari tiga dimensi yaitu dimensi kesadaran kritis, dimensi partisipasi dan dimensi kontrol belum optimal. Sementara dua dimensi lainnya, yaitu dimensi kesejahteraan dan dimensi akses sudah sudah optimal.

Pertama, pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang dilihat dari dimensi kesejahteraan sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek dimensi kesejahteraan yaitu aspek penghasilan, kecukupan makanan, fasilitas kesehatan dan jaringan sosial. Dilihat dari aspek penghasilan sudah terpenuhi, aspek kecukupan makanan sudah terpenuhi, dan aspek sosial sudah terpenuhi. Namun, masih ada satu aspek belum terpenuhi yaitu aspek fasilitas kesehatan.

Kedua, pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang dilihat dari dimensi akses sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari lima aspek dimensi akses yaitu tenaga kerja, pelatihan, bantuan modal, fasilitas promosi dari pemerintah, dan layanan sertifikasi pemerintah. Dilihat dari aspek tenaga kerja, jumlah tenaga kerja

laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Dari sisi pelatihan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit baik laki-laki maupun perempuan telah mendapatkan berbagai pelatihan dari berbagai *stakeholder* seperti Pemerintah Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Koperasi Semarang, DPRD Kota Semarang dan akademisi (UNDIP, UPGRIS, UNNES, UNWAHAS, STIPARI, dan UIN Walisongo). Kemudian, dilihat dari aspek bantuan modal Desa Wisata Nongkosawit pernah menerima bantuan PNPM Mandiri sebesar 75 juta, namun belum ada bantuan tambahan setelah itu. Selanjutnya, aspek fasilitas promosi dukungan datang melalui program Gerai Kopimi dari Dinas Koperasi Kota Semarang, penyediaan *platform website* dari lembaga pemerintah (Disbudpar Kota Semarang dan Kecamatan Gunung Pati) dan *platform digital* dari *Exovillage Indonesia* sebagai media promosi. Terakhir, aspek layanan sertifikasi pemerintah, UMKM di Desa Wisata Nongkosawit mendapatkan fasilitas gratis berupa izin PIRT dan sertifikasi halal dari Pemerintah Kota Semarang.

Ketiga, pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang dilihat dari dimensi kesadaran kritis belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari dua aspek dimensi kesadaran kritis yaitu pemahaman masyarakat dan sikap serta cara pandang. Dari aspek pemahaman masyarakat terutama perempuan Desa Wisata Nongkosawit dalam pengembangan pariwisata masih rendah, sehingga mempertahankan subordinasi terhadap perempuan. Selanjutnya, sikap dan cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dalam pengembangan pariwisata di

Desa Wisata Nongkosawit sudah cukup baik, tetapi masih terkendala hambatan struktural dan budaya. Keterbatasan keterlibatan perempuan dibandingkan laki-laki menciptakan kesenjangan yang membuat perempuan cenderung merasa inferior.

Keempat, pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang dilihat dari dimensi partisipasi belum optimal. Dilihat dari aspek peran perempuan dalam pengelolaan wisata, dan keterlibatan perempuan dalam pengembangan pariwisata. Dari aspek peran perempuan dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Nongkosawit adalah pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), anggota seni karawitan, dan pelaku UMKM. Kemudian, aspek keterlibatan perempuan dalam pengembangan desa wisata masih rendah dan terbatas.

Kelima, pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang dilihat dari dimensi kontrol belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek kekuasaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kesetaraan kontrol. Dari aspek kekuasaan perempuan belum memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit. Kelima, perempuan di Desa Wisata Nongkosawit belum memiliki kontrol dalam pengelolaan pariwisata di desa tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit belum optimal. Selain itu, dalam analisa paramida longwe dapat diketahui bahwa

pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit ada di dimensi kedua yaitu akses. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih rendah. Selain itu, tingkat pemberdayaan perempuan masih kecil sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pembangunan di Desa Wisata Nongkosawit.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan pariwisata berbasis Pengarusutamaan Gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang

Pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit, Kota Semarang, didukung oleh nilai kepentingan masyarakat. Nilai ini mencerminkan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi serta pelestarian budaya melalui sektor pariwisata. Namun, pengembangan ini juga menghadapi berbagai hambatan, seperti aspek nilai, komunikasi, kepercayaan, dan sumber kebijakan. Dari aspek nilai, masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi tantangan utama. Selain itu, kualitas pelayanan di desa wisata belum optimal karena kurangnya praktik dari pelatihan yang diberikan. Struktur organisasi Pokdarwis dan Karang Taruna juga belum terorganisir dengan baik, sehingga belum memiliki visi misi yang jelas dalam pengembangan wisata. Dari aspek komunikasi antara pemerintah kelurahan dan pokdarwis masih terbatas. Hubungan dengan masyarakat dan pelaku UMKM hanya terjadi saat diperlukan, sementara penyebaran informasi masih terbatas pada grup

WhatsApp, dan *Instagram* belum dimanfaatkan secara rutin. Kemudian dari aspek kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pokdarwis masih kurang. Terakhir, dari aspek kebijakan, peraturan terkait pengarusutamaan gender, seperti Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, belum terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang, sehingga optimalisasi peran gender dalam pengembangan wisata belum maksimal..

Selain itu, hambatan dalam pengarusutamaan gender juga dipengaruhi oleh faktor sosial, pekerjaan, dan beban ganda. Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam pendidikan dan pelatihan, persepsi masyarakat terkait peran gender dalam pengembangan wisata masih rendah. Kesempatan kerja bagi perempuan juga terbatas, dengan partisipasi mereka yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan cenderung hanya berperan sebagai pendukung, sementara laki-laki menduduki posisi strategis dalam sektor pariwisata. Beban ganda yang dihadapi perempuan juga menjadi kendala, karena mereka lebih banyak mengurus pekerjaan rumah tangga, sehingga sulit membagi waktu untuk bekerja di bidang pariwisata. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan masih terdapat kendala dalam penelitian ini, berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan:

1. Dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit dilihat dari dimensi kesadaran kritis belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, Ketua Pokdarwis bersama Pemerintah Kota Semarang dan Kelurahan Nongkosawit dapat mengundang tokoh pariwisata guna memberikan edukasi tentang pentingnya sadar wisata dan pengarusutamaan gender. Selanjutnya, memberikan pelatihan rutin berupa *treatment* yaitu masyarakat diminta mengaplikasikan pemahaman mereka yang telah didapatkan dari edukasi. Caranya, setiap individu dapat mengidentifikasi dan memetakan kemampuan personal mereka sebagai bentuk evaluasi pemahaman. Proses ini dilakukan secara bertahap, karena membangun kesadaran membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan.
2. Dalam pengembangan pariwisata Dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit dilihat dari dimensi partisipasi masih belum optimal dan terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi desa wisata. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di bawah Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit. Kelompok ini akan dibina oleh Pemerintah Kota Semarang, bekerja sama dengan Kelurahan Nongkosawit dan akademisi. Tujuannya adalah untuk mengorganisir peran baik laki-laki maupun perempuan dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, seperti UMKM dan pengelolaan

destinasi wisata, agar selaras dengan rencana strategis dan program Desa Wisata Nongkosawit.

3. Dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang masih terdapat ketimpangan dalam hal kontrol, di mana laki-laki lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Untuk mengatasi hal tersebut, Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit perlu melakukan restrukturisasi organisasi dan membangun budaya yang lebih inklusif. Selain itu, perlu dibuat visi dan misi yang jelas dengan pendekatan gender budgeting dan gender auditing. *Gender budgeting* bertujuan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap peluang yang ada. Sementara itu, *gender auditing* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program organisasi telah mendukung kesetaraan gender. Agar kedua hal tersebut dapat berjalan efektif, posisi dan kapasitas baik perempuan maupun laki-laki dalam organisasi harus ditingkatkan.
4. Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit adalah komunikasi dan penyebaran informasi masih terbatas serta kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Untuk mengatasi hal ini, Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit perlu membuat ruang komunikasi yang terstruktur dan memiliki skema yang jelas, seperti diskusi, lokakarya, atau forum terbuka melalui pertemuan rutin yang dilakukan setiap satu

bulan sekali. Pertemuan rutin bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja pokdarwis dan memberikan ruang kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan ide mereka dalam pengembangan desa wisata.

5. Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terutama perempuan, terhadap Pokdarwis dan pemerintah. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Pokdarwis dapat menggunakan pola komunikasi yang lebih transparan dengan cara menggunakan media sosial seperti *Instagram* dan *website* desa wisata untuk memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan, hasil evaluasi kinerja pokdarwis dan penggunaan dana dalam pengembangan pariwisata. Sementara itu, Pemerintah Kota Semarang perlu mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kebijakan pariwisata, membuat standar untuk pelaporan praktik gender, dan meluncurkan platform digital yang transparan dan mudah diakses.
6. Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan wisata Kota Semarang. Akibatnya, peran perempuan dalam sektor pariwisata belum optimal. Solusinya adalah melakukan Pemerintah Kota Semarang mengelaborasi isu gender dan pariwisata ke dalam kebijakan pariwisata agar lebih responsif terhadap kesetaraan. Salah satu

caranya adalah dengan mencantumkan aspek gender dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK), yang menjadi panduan dalam pengembangan sektor pariwisata dalam jangka waktu tertentu.

7. Hambatan sosial budaya yang membatasi peran perempuan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit dibandingkan dengan laki-laki. Untuk mengatasi faktor penghambat pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata, Pemerintah Kota Semarang bersama Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis melalui tiga cara yaitu, pertama pokdarwis menyelenggarakan ruang karya yang dihasilkan oleh perempuan Desa Wisata Nongkosawit berbasis swadaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa perempuan juga memiliki kapasitas sebagai pelaku wisata. Kedua, Pemerintah Kota Semarang membuat skema perekrutan dan pelibatan perempuan dalam pengembangan pariwisata dapat diwujudkan melalui kebijakan berbasis gender. Ketiga, Pemerintah Kelurahan Nongkosawit dan Pokdarwis bisa mengidentifikasi serta membagi peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pariwisata secara terstruktur dan terjadwal agar keterlibatan perempuan semakin meningkat.